



## **Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018-2022**

**Euis Syafitri<sup>1</sup>, Maskur\*<sup>2</sup>, Ramla Ilham Darise<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi Universitas Madako Tolitoli

### **Informasi Artikel**

\*Corresponding Penulis :  
[maskurmahmud5@gmail.com](mailto:maskurmahmud5@gmail.com)



This is an open access article under the  
CC BY license  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **ABSTRACT**

*Effectiveness and efficiency of regional financial management in Tolitoli Regency in 2018-2022. The purpose of this study was to determine the effectiveness and efficiency of regional financial management of Tolitoli Regency in 2018-2022. The type of research used is descriptive quantitative research with technical data analysis of effectiveness ratios and efficiency ratios with secondary data obtained at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The results of this study indicate that the analysis of the effectiveness of regional financial management on capital expenditure with an average in fiscal year 2018 to fiscal year 2022 of 94.57 percent is classified as effective. Efficiency analysis of regional financial management with an average of 94.65 percent is classified as less efficient.*

**Keyword:** *Effectiveness, Efficiency, Regional Finance*

### **ABSTRAK**

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018-2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknis analisis data rasio efektivitas dan rasio efisiensi dengan data sekunder yang diperoleh di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada belanja modal dengan rata-rata pada Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun anggaran 2022 sebesar 94,57 persen tergolong efektif. Analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 94,65 persen tergolong kurang efisien.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Efisiensi, Keuangan Daerah

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan wewenang kepada pemerintah yang ada di daerah untuk menggali potensi dan mengatur serta mengelola daerahnya sendiri. Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan tumbuhnya kapasitas perekonomian daerah, terutama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan daerah. Menurut (Sari et al., 2021), Untuk mencapai otonomi, setiap daerah otonom harus mempunyai kemampuan mengatur pemerintahannya sendiri, menggunakan sumber daya keuangan secara mandiri, mengelola dan mempergunakan sumber daya keuangannya sendiri untuk membiayai segala kegiatannya, dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan sebagai ciri utama dari kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi.

Desentralisasi kebijakan anggaran dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan bantuan desentralisasi, pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat di berbagai sektor, khususnya pelayanan publik sesuai dengan sumber potensi di daerah, sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi. Menurut (Naibaho, 2023), dalam tahapan perencanaan perlu diikuti dengan mekanisme yang baik, akan menjamin keserasian dalam pembangunan disetiap daerah. Pemberian otonomi daerah dan

desentralisasi seluas-luasnya kepada daerah perlu diikuti pengawasan secara intens agar tidak terjadi ketimpangan dan penyelewengan dalam pemberian wewenang maupun kekuasaan kepada daerah.

Keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi tidak lepas dari kemampuan pemerintah daerah dibidang keuangan. Hal ini dikarenakan oleh, kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan pemerintahan yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi. Pengelolaan keuangan daerah diawali dengan perencanaan ataupun penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana Tahunan pemerintah yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam APBD ini menggambarkan secara nyata terkait kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Melalui APBD inilah akan menjadi upaya dalam meningkatkan pelayanan, pembangunan, maupun menciptakan lapangan pekerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah dan dapat meningkatkan PAD.

Pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan, dalam mempertahankan dan meningkatkan kemampuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Namun, ada beberapa daerah yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menemukan industri-industri yang mampu memanfaatkan potensi yang ada di daerah, sehingga akan mendorong pembangunan daerah. Menurut (Meiriki et al., 2020), Tujuan pembangunan daerah yang dilakukan pemerintah adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan tentunya juga untuk memajukan wilayah yang ada di daerah melalui program-program yang dilaksanakan.

Keseluruhan program yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, perlu adanya pengawasan terhadap anggaran yang akan dikeluarkan. Dalam pelaksanaan program-program kegiatan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan melihat potensi sumberdaya di daerah untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, dimana dalam anggaran tersebut berpedoman pada pelaksanaan tindakan pemerintah daerah, meliputi struktur pendapatan, struktur belanja, dan struktur pembiayaan dalam satuan rupiah. Potensi sumberdaya yang dikelola pemerintah daerah akan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi belanja daerah.

Salah satu kontribusi keuangan APBD terhadap belanja daerah adalah investasi pada belanja modal untuk menambah aset tetap. Pembagian alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana masing-masing daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Oleh karena itu, belanja modal akan menjadi pendukung terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut (Pratiwi & Malik, 2021), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam anggaran untuk perolehan aktiva tetap atau aktiva lain yang menguntungkan selama lebih dari satu Tahun anggaran. Hal ini mencakup investasi dalam perolehan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jaringan jalan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.

Tabel 1.1  
Realisasi pendapatan Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2018	1.071.710.023.435	1.037.997.709.118,42	-6
2019	1.221.884.550.104	1.146.983.897.809,38	10
2020	1.150.104.381.666	1.098.397.342.360,36	-4
2021	1.176.463.475.695	1.146.372.074.331,41	4
2022	1.080.592.417.640	1.045.960.573.253,44	-9

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupten Tolitoli, (2023)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui pada realisasi pendapatan dan realisasi

belanja setiap Tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana pada realisasi pendapatan Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2019 meningkat sebesar 10 persen atau Rp.108.986.188.690,96, dan Tahun anggaran 2020 sampai Tahun 2021 meningkat sebesar 4 persen atau Rp.47.974.731.971,05, yang diakibatkan oleh peningkatan pendapatan transfer pada Dana Alokasi Khusus (DAK), dan PAD. Kemudian pada Tahun anggaran 2019 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4 persen atau Rp.48.586.555.449,02 dan Tahun anggaran 2021 sampai Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9 persen atau Rp.100.411.501.077,97, yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan transfer dari pusat yaitu pada alokasi DAK.

Tabel 1.2  
Realisasi belanja Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2018	933.522.211.710,75	883.942.731.886	-6
2019	1.075.472.336.807	1.015.273.832.707	15
2020	1.009.286.186.887	939.798.658.450	-7
2021	1.180.151.866.960	1.118.273.989.888	19
2022	1.117.778.371.876	1.069.798.833.630	-4

Sumber : *Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tolitoli, (2023)*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pada realisasi belanja Tahun anggaran 2018 sampai Tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 15 persen atau Rp.131.331.100.821,00 dan Tahun anggaran 2020 sampai Tahun anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 19 persen atau Rp.178.475.331.438,12, yang diakibatkan oleh kenaikan pada pendapatan daerah terutama pada pendapatan transfer sehingga belanja operasional dan belanja modal meningkat. Kemudian pada Tahun anggaran 2019 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7 persen atau Rp.75.475.174.257,00. dan Tahun anggaran 2021 sampai Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4 persen atau Rp.48.475.156.257,85, yang diakibatkan oleh penurunan pada pendapatan daerah sehingga terjadinya penurunan pada alokasi belanja modal. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan keuangan perlu dilaksanakan secara terintegrasi dalam artian yaitu bagaimana menyatukan program maupun kegiatan dengan melihat potensi daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, sehingga akan menjadikan pemerintahan yang mandiri sesuai tujuan otonomi. Kemudian kebijakan anggaran dalam APBD akan menjadi acuan pemerintah dalam rencana kerja pembangunan daerah yang merupakan perencanaan operasional anggaran atau proses penerapan rencana untuk mencapai tujuan.

Permasalahan selanjutnya yaitu keterbatasan APBD Kabupaten Tolitoli, dalam alokasi belanja daerah masih terjadi kesenjangan atau ketidaksetaraan atau perbedaan dalam pembangunan daerah, akibat tidak meratanya pembangunan daerah di Kabupaten Tolitoli. Hal ini juga menjadi masalah antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat menginginkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat mendorong kegiatan perekonomian Kabupaten Tolitoli.

Namun pada belanja daerah Kabupaten Tolitoli masih belum mampu mendorong laju pembangunan daerah. Dapat dilihat dari pembiayaan belanja operasional lebih besar daripada belanja modal. Kemudian pada belanja APBD Kabupaten Tolitoli belum sesuai dengan alokasinya dikarenakan alokasi pada belanja pegawai lebih besar dari belanja modal. Data pada Tahun 2022 menunjukkan jumlah belanja pegawai sebesar Rp.430.458.633.900,

sedangkan untuk belanja modal hanya sebesar Rp.132.507.022.954. Seharusnya anggaran yang dialokasikan pada belanja modal itu lebih besar dari belanja lainnya, agar pembangunan daerah yang direncanakan pada Tahun sebelumnya dapat terlaksana dengan baik dan akan memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Jaminan ketersediaan dana belanja modal dalam pembangunan daerah akan ada, jika pengelolaan keuangan sudah efektif dan efisien, sebaliknya apabila pengelolaan belum efektif dan efisien, maka tidak akan ada jaminan tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya dorongan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan akan semakin baik dan akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan itu sendiri dan akan menjamin kemandirian keuangan daerah. Kemudian, diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai dirinya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai hal tersebut, berjudul “Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018-2022”.

### **Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut (Opina, 2022), efektivitas merupakan keberhasilan suatu tindakan dapat diukur berdasarkan pencapaian dari tujuan tersebut. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pengukuran efektivitas dan efisiensi di dasarkan pada sumber daya organisasi yang diperoleh dan di gunakan secara ekonomis artinya tidak terjadinya pemborosan, salah alokasi, salah sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut efektif. Menurut (Darmadi, 2021, p. 92), Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (hasil akhir).

### **Pengertian Efisiensi**

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang rendah untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi juga menekankan pada hasil dan juga pada daya atau usaha, maupun pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak menjadi pemborosan. Menurut (Opina, 2022), efisiensi yaitu menekankan pada hasilnya, dan juga di tekankan pada daya atau usaha maupun pengorbanan dalam mencapai hasil agar pemborosan tidak terjadi. Efisiensi adalah perbandingan antara output (keluaran) atau barang dan jasa yang didapat dari input (masukan) dalam satuan unit kerja atau target yang ditetapkan. Efisiensi yaitu bagaimana memperoleh input dengan biaya atau harga lebih rendah. Menurut (Devinci et al., 2023), Efisiensi adalah pencapaian output dengan input tertentu atau pencapaian output dengan input terendah. Efisiensi adalah perbandingan input dan output yang berkaitan dengan target atau standar kinerja.

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD adalah rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian juga pengeluaran daerah dan semua ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, menurut (Sari et al., 2021), Menurut (Manopo et al., 2019) APBD merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran merupakan alat control atau pengawasan terhadap penerimaan atau pengeluaran dimasa yang akan datang.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan yaitu kemampuan dalam memprioritaskan maupun menyeimbangkan antara permintaan dan kebutuhan yang tidak terbatas dengan terbatasnya sumber daya keuangan. Untuk menjalankan proses otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah harus dapat mengelola dana yang ada dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk operasional pemerintahan. Sebagai pemegang kendali, pemerintah harus dapat mengoptimalkan anggaran daerahnya, menurut (Andriyan, 2021).

### **Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah adalah proses atau kegiatan intervensi yang bisa terjadi secara alami maupun tidak alami dengan memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya. Namun, melakukan perubahan dan pertumbuhan dalam pembangunan perlu dilakukan secara terencana, sesuai dengan kebijakan pemerintah maupun keadaan yang ada, sehingga Keberhasilan pembangunan disuatu wilayah dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan daerah adalah proses kegiatan, masyarakat daerah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan budaya yang bertempat tinggal di suatu daerah tertentu, menurut (Simanjuntak & Silitonga, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data deret waktu (*time series*) Tahun 2018-2022 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tolitoli berupa Laporan Keuangan Tahunan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dari Opina (2022), yang mengatakan bahwa efektifitas adalah hubungan antara *output* atau hasil dan tujuan. Semakin banyak kontribusi *output* untuk mencapai tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Fokus efektivitas adalah hasil. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa efektif Pengelolaan Keuangan, dengan melihat perbandingan antara realisasi dan anggaran belanja dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sedangkan Standar efektivitas yang digunakan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
2. Hasil perbandingan antara 90% - 100% berarti efektif
3. Hasil perbandingan antara 80% - 90% berarti cukup efektif
4. Hasil perbandingan antara 60% - 80% berarti kurang efektif
5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif

Selanjutnya untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Rumus Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, yaitu:

1. Lebih dari 100% tidak efisien;
2. Antara 90%-kurang 100% kurang efisien;
3. Antara 80%-kurang 90% cukup efisien;

4. Antara 60%-kurang 80% efisien;
5. Dibawah 60% sangat efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Perhitungan Rasio Efektivitas

Perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli menggunakan analisis efektivitas dengan menggunakan rasio terhadap APBD pada Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022. Salah satu prinsip yang digunakan untuk penyusunan APBD adalah efektif dan efisien. Menurut (Opina, 2022), mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran artinya yaitu tercapainya sasaran ataupun tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut (Amin, 2015), rasio ini dititik beratkan pada gambaran terkait bagaimana pemerintah daerah dapat mengalokasikan ataupun memprioritaskan dana pada belanja rutin pemerintah dan belanja operasional. Dalam rasio ini dapat menjelaskan secara lebih detail terkait kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penggunaan dana pada pelaksanaan program maupun kebijakan pemerintah.

$$\text{Rumus rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100 \text{ persen}$$

Tabel 4.3

Ringkasan perhitungan rasio efektivitas pada realisasi belanja modal Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018-2022

No	Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Persentase	
1	2018	183.621.018.667,00	202.038.581.842,00	90,87	Cukup
2	2019	287.501.006.743,00	298.371.878.551,00	96,35	Efektif
3	2020	190.699.517.034,00	209.908.249.991,00	90,84	Cukup
4	2021	202.417.208.755,00	207.156.834.092,00	97,70	Efektif
5	2022	132.507.022.954,00	136.502.539.413,00	97,06	Efektif
	<b>Rata-rata</b>	<b>199.349.154.830,00</b>	<b>210.795.616.777,80</b>	<b>94,56</b>	

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, Pada Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2020 tergolong cukup efektif dengan presentase sebesar 90,88 persen dan 90,85 persen, Pada Tahun anggaran 2019, 2021, dan Tahun 2022 tergolong efektif dengan presentase sebesar 96,36 persen, 97,71 persen, dan 97,01 persen, dengan rata-rata keseluruhan tingkat efektivitas adalah sebesar 94,57 persen tergolong efektif.

Hasil kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa selama lima Tahun terakhir kemampuan pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam pengelola keuangan daerah tergolong sudah baik, yang artinya dalam pencapaian output (realisasi belanja) berdasarkan input (anggaran belanja) yang ditetapkan sudah optimal.

#### Perhitungan Rasio Efisiensi

Pada perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli dengan analisis efisiensi menggunakan rasio terhadap APBD pada Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2022. Efisiensi yaitu bagaimana dalam suatu kegiatan dapat memperoleh input dengan biaya yang lebih rendah dan dapat memberikan manfaat, menurut (Opina, 2022). Rasio efisiensi merupakan suatu perbandingan antara besaran biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan melalui realisasi pendapatan yang diterima, menurut (Sartika, 2019). Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah terkait dengan penggunaan anggaran dalam pencapai tujuan dengan penggunaan dana yang efisien.

$$\text{Rumus rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100 \text{ persen}$$

Tabel 4.5

Ringkasan perhitungan rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2018-2022

No	Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Persentase	
		<b>Keterangan</b>			
1	2018	883.942.731.887,00	1.037.997.709.118,43	85,15	Cukup efisien
2	2019	1.015.273.832.708,00	1.146.983.897.809,39	88,51	Cukup efisien
3	2020	1.095.466.697.457,00	1.098.397.342.360,37	99,72	kurang efisien
4	2021	1.118.273.989.889,00	1.146.372.074.331,42	97,54	kurang efisien
5	2022	1.069.798.833.631,00	1.045.960.573.253,45	102,27	Tidak efisien
	<b>Rata-rata</b>	1.036.551.217.114,40	1.095.142.319.374,61	94,64	

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh bahwa pada Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 tergolong cukup efisien, dengan presentase sebesar 85,16 persen dan 88,52 persen. Pada Tahun anggaran 2019 dan Tahun 2021 tergolong kurang efisien dengan presentase sebesar 99,73 persen, dan 97,55 persen. Dan pada Tahun anggaran 2022 tergolong tidak efisien karena >100 persen dengan presentase sebesar 102,28 persen. Rata-rata keseluruhan tingkat efisiensi adalah sebesar 94,65 persen tergolong kurang efisien.

Rata-rata tingkat perhitungan efisiensi selama lima Tahun terakhir menghasilkan kriteria kurang efisien, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam pengelolaan keuangan daerah masih rendah dan belum optimal, sehingga pencapaian output (realisasi belanja) dengan input (realisasi pendapatan) yang ditetapkan tidak maksimal.

## PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2022 tergolong efektif dengan rata-rata persentase sebesar 94,59 persen artinya dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tolitoli, perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya sudah tercapai, karena efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dan tidak membicarakan penghematan biaya, tenaga maupun waktu. Sehingga makin besar penggunaan anggaran maka pengelolaannya makin efektif.

Bila dicermati melalui hasil perhitungan berdasarkan kriteria tersebut pada Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2020 tergolong cukup efektif, Cukup dalam artian penggunaan anggaran tidak melebihi atau mengurangi tetapi menyesuaikan dengan presentase dari 80 persen ke 90 persen. Disebabkan oleh, pengurangan penggunaan anggaran belanja pada beberapa pos belanja daerah, sehingga realisasinya tergolong cukup efektif.

Pada Tahun anggaran 2019, 2021 dan 2022 tergolong efektif. Disebabkan oleh, pengeluaran daerah dalam pelaksanaan maupun proses kegiatan melebihi target anggaran yang ditetapkan. Artinya dalam penggunaan anggaran pada belanja modal sudah mencapai target atau tujuan karena anggaran yang ditetapkan melebihi dari realisasinya. Tetapi jika di lihat dari pembangunan daerah belum berdampak besar. Di lihat dari terjadinya fluktuasi selama lima Tahun terakhir pada Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB), yang disebabkan oleh kegiatan perekonomian yang produktif di daerah masih rendah. Dan juga Kabupaten Tolitoli termasuk dalam 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam artian yaitu kualitas pembangunan daerah rendah.

Dalam penggunaan alokasi dana yang digunakan oleh pemerintah daerah yaitu masih memprioritaskan pada belanja oprasional untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan, dimana dalam pengalokasian pada belanja operasional setiap Tahun meningkat, diakibatkan oleh belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik apabila belanja operasional tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah Kabupaten Tolitoli cenderung pada pengeluaran rutin untuk memenuhi kebutuhan aktivitas pemerintah daerah.

Rendahnya belanja modal mengakibatkan kurangnya PAD. Rendahnya PAD Kabupaten Tolitoli, dikarenakan oleh pemerintah daerah belum mampu melihat potensi sumberdaya produktif di daerah, maka dari itu perlunya melihat sumber penerimaan daerah dan perluasan penggalan pada sumber objek pajak yang mampu meningkatkan penerimaan pada pendapatan pemerintah daerah. Artinya yaitu bagaimana pemerintah melihat maupun memanfaatkan program atau kegiatan dengan potensi di daerah, sehingga akan meningkatnya kesejahteraan pada masyarakat. Di lihat dari kontribusi PAD dari Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2022 terhadap belanja modal masih rendah. Disebabkan oleh, rendahnya perolehan dana dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, sehingga pemerintah daerah masih bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Rendahnya perolehan PAD di karenakan oleh adanya pembebasan pajak bagi UMKM, kurangnya aktivitas produksi di daerah, dan kurangnya hasil penjualan atau perolehan pada BMD.

Pemberian dana transfer dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berdampak positif dan negatif, di mana dalam pemberian dana transfer digunakan untuk mencapai tujuan negara yaitu pemerataan kekayaan seluruh masyarakat dan juga untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif yaitu menyebabkan pemerintah daerah masih akan bergantung dengan dana transfer tersebut.

Hasil peneliti ini sejalan dengan hasil penelitian (Devinci et al., 2023) tingkat efektivitas pengelolaan keuangan pada Kabupaten Sikka Tahun 2016-2022 dengan rata-rata sebesar 96,48 persen tergolong efektif. Menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang ditetapkan telah tercapai, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Sikka telah berhasil dalam merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan untuk menunjang pembangunan yang ada di daerah.

### **Analisis Efisiensi**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun anggaran 2018 sampai Tahun 2022 dengan rata-rata presentase sebesar 94,65 persen tergolong kurang efisien, artinya perencanaan yang direncanakan oleh pemerintah tidak tercover atau tidak terealisasi karena dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah melihat skala prioritas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Dimana dalam pengeluaran anggaran lebih besar untuk belanja operasional, menyebabkan anggaran yang digunakan hanya untuk pemenuhan aktivitas sehingga tujuan utama dari otonomi daerah tidak tercapai. Kemudian dalam pelaksanaannya, dapat memperoleh input dengan biaya yang lebih rendah, dalam artian biaya yang dikeluarkan dapat memperoleh pendapatan melalui realisasi yang diterima dan efisiensi mengacu pada penggunaan biaya, tenaga maupun waktu. Oleh karena itu, dalam penggunaan anggaran perlu melihat skala prioritas daerah sehingga untuk memenuhi tujuan dari efisiensi dapat tercapai.

Bila dicermati melalui hasil perhitungan berdasarkan kriteria efisiensi pada Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019 dengan presentase sebesar 85,16 persen dan 88,52 persen tergolong cukup efisien, cukup dalam artian yaitu penggunaan anggaran tidak melebihi atau mengurangi presentase pada kriteria efisiensi. Disebabkan oleh, penggunaan belanja daerah terjadi penghematan atau pengurangan pada anggaran yang ditetapkan. Sehingga mengurangi terjadinya pemborosan dalam penggunaan anggaran. Pada Tahun anggaran 2020 dan Tahun 2021 tergolong kurang efisien dengan persentase sebesar 99,73 persen dan 97,55 persen. Disebabkan oleh, pengeluaran pemerintah lebih besar untuk pemenuhan aktivitas dan skala prioritas pemerintah dalam pengalokasian pada pos-pos belanja mengakibatkan terjadinya pemborosan penggunaan anggaran.

Kemudian pada Tahun anggaran 2022 persentase sebesar 102,28 persen >100 persen sehingga tergolong tidak efisien. Disebabkan oleh, besarnya pengeluaran belanja daerah dibandingkan pendapatan, sehingga menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Penyebab terjadinya defisit pada Tahun anggaran 2022. Dikarenakan oleh, penurunan pada pendapatan daerah mulai dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Terjadinya defisit pada belanja daerah, akibat dari pemenuhan kebutuhan aktivitas pemerintah meningkat setiap Tahun dan meningkatnya alokasi belanja operasional menyebabkan belanja daerah meningkat. Sehingga ketika pendapatan daerah menurun, maka akan mempengaruhi belanja daerah.

Penyebab dari kurang efisiennya anggaran dikarenakan oleh, skala prioritas daerah dalam menggunakan anggaran belanja, sehingga sering terjadinya pemborosan penggunaan anggaran. Dalam artian, pengeluaran anggaran kurang memberi manfaat akibat dari besarnya pengeluaran belanja operasional yang didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Apabila pendapatan daerah menurun sedangkan belanja daerah besar maka pengeluaran tersebut akan menjadi tidak efisien. Jika dikaitkan dengan pembangunan bisa dikatakan belum tercapai karena biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input cukup besar dan perolehan PAD masih rendah.

Rendahnya penerimaan daerah akan berdampak pada pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka perlunya melakukan pemaksimalan pada potensi sumberdaya daerah agar menjadikan pemerintah yang mandiri dan tidak bergantung dengan dana transfer. Untuk itu, dalam mengatur pengeluaran belanja harus direncanakan dengan jelas agar anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat. Apabila anggaran belanja pemerintah daerah sesuai target yang ditetapkan, maka keberhasilan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi belanja tersebut kurang memiliki arti. Dalam artian, anggaran yang dikeluarkan untuk realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian (Saknosiwi et al., 2021) tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dari Tahun 2014-2018 berada di atas 90 tergolong kurang efisien, menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah masih sering terjadi fluktuasi akibat dari ketidakmampuan dalam menekan biaya dan merealisasikan target tersebut sehingga ditunjukkan dengan pencapaian target melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa jumlah yang dihasilkan dari penerimaan daerah lebih kecil daripada jumlah yang dihasilkan dari biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan penerimaan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka pada analisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada belanja modal dengan rata-rata pada Tahun anggaran 2018 hingga Tahun 2022 sebesar 94,57 persen tergolong efektif. Sedangkan pada analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah Tahun anggaran 2018 hingga Tahun 2022 dengan rata-rata sebesar 94,65 persen tergolong kurang efisien.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna*, 80-91. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Darmadi, D. (2021). Administrasi Keuangan Daerah. In *Empatdua Media*.
- Devinci, Y. M., Dekrita, A. Y., & Samosir, S. M. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51-70. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.44>
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*, 1-14.
- Meiriki, A., Musharianto, A., & NS, N. L. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 10-19.

<https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i1.3140>

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nomor 690.900.327. 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja keuangan.
- Naibaho, D. Y. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. *Jurnal Informasi*.
- Opina, A. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Toba (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Pratiwi, W. O. R. S., & Malik, E. (2021). Analisis belanja modal dan belanja pemeliharaan anggaran pemerintah daerah kabupaten buton selatan. *Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMButon*, 5, 24–40.
- Sari, R. K., Woestho, C., & Handayani, M. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1), 45–54. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.324>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat). *Methosika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97–112. <https://doi.org/10.46880/jsika.v3i2.43>